

## PENDIDIKAN KARAKTER

### (Studi Analisis Integratif Komparatif Lintas Negara)

Oleh: Afandi

**Abstrak:** Pendidikan akhlak atau yang kini lebih ngetren disebut juga pendidikan karakter merupakan hal yang sangat penting dan harus menjiwai segala bentuk pendidikan. Jika tidak, pendidikan akan hanya menimbulkan madarat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mengenai sejak kapan seharusnya anak mendapat pendidikan khususnya pendidikan akhlak atau juga pendidikan karakter, ada beberapa teori. Islam telah mengajarkan pendidikan anak sejak dini, semenjak ia masih dalam kandungan, bahkan pada saat prosesi pembuahan, bahkan lagi ada yang berpendapat jauh hari sebelum kedua orang tuanya menikah. Berbagai isu sosial yang terjadi di tanah air saat ini sepertinya tidak dapat dilepaskan dari peranan pendidikan. Isu mengenai korupsi, kekerasan, penipuan dan yang lainnya, sepertinya sudah begitu merebak hingga memunculkan pemakluman, Pendidikan harus mampu membentuk karakter setiap pribadi siswa/pelajar. Siapa yang tidak mengelus dada melihat pelajar yang tidak punya sopan santun, suka tawuran, bagus nilainya untuk "pelajaran" pornografi, senang narkoba, dan hobi begadang dan kebut-kebutan<sup>1</sup>. Oleh karena nya pendidikan karakter harus di tanamkan sejak dini pada peserta didik khususnya dan juga harus di kembangkan demi mencetak generasi yang berbudi luhur.

**Kata kunci:** Karakter, Pendidikan

---

<sup>1</sup>Ya'kub, M. Edi. 'Quo Vadis' Pendidikan Karakter?. Dalam <http://edukasi.kompas.com>, akses pada 13 Februari 2016 pukul 17.07 wib

## A. Pendahuluan

Berbagai isu sosial yang terjadi di tanah air saat ini sepertinya tidak dapat dilepaskan dari peranan pendidikan. Isu mengenai korupsi, kekerasan, penipuan dan yang lainnya, sepertinya sudah begitu merebak hingga memunculkan pemakluman. Anehnya, masyarakat sendiri tidak memahami bahwa mereka terlalu sering mengkonsumsi tontonan isu moral negatif tersebut di media massa<sup>2</sup>. Pendidikan seharusnya mampu menghasilkan manusia yang bermoral atau memiliki budi pekerti. Hal ini dikatakan Driyarkara, seorang Yesuit, beberapa tahun silam. Pendidikan seharusnya mampu merangsang seseorang berpikir kritis dan mampu memilih alasan yang tepat dalam setiap aktivitasnya. Pendidikan harus mampu membentuk karakter setiap pribadi siswa/pelajar. Siapa yang tidak mengelus dada melihat pelajar yang tidak punya sopan santun, suka tawuran, bagus nilainya untuk "pelajaran" pornografi, senang narkoba, dan hobi begadang dan kebut-kebutan<sup>3</sup>.

Jelas hal yang demikian ini terjadi karena adanya kesalahan dalam memberikan pendidikan karakter pada peserta didik. Penulis menebak, hal ini terjadi karena muatan-muatan pendidikan yang diberikan telah mengesampingkan sisi psikologis dan moral dari pendidikan itu sendiri. Dalam jurnal ini, penulis akan membahas salah satu sisi pendidikan karakter yang seringkali terlewatkan dalam perencanaan, pengembangan dan evaluasi program pendidikan karakter, yaitu mengembangkan budaya sekolah yang berjiwa pembentukan karakter psikologis. Secara lebih khusus, penulis akan membahas bagaimana mengembangkan kultur akademik dalam lingkungan sekolah, memahami tantangan, mencari implementasi strategi efektif *Scientific Problem Solving* bagi pengembangan kultur tersebut bagi pembentukan karakter bangsa.

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggung jawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat<sup>4</sup>. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal I UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Amanah UU Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan

---

<sup>2</sup>Angkasa, Ig Kingkin Teja. Merealisasikan Pendidikan Karakter. Artikel Opini Koran Kompas. Dalam <http://edukasi.kompas.com>, diakses pada 13 Februari 2016 pukul 15.34 wib

<sup>3</sup>Ya'kub, M. Edi. 'Quo Vadis' Pendidikan Karakter?. Dalam <http://edukasi.kompas.com>, akses pada 13 Februari 2016 pukul 17.07 wib

<sup>4</sup>Suyanto. 2009. Urgensi karakter. Artikel opini di situs resmi Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam <http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id>, Akses pada 13 Februari 2016 pukul 16.50 wib

tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Karakter sangat erat dengan sikap dan pilihan cara bertindak. Oleh karena itu, maka Pendidikan karakter harus diberikan sedini mungkin kepada setiap Peserta Didik / Siswa / Pelajar.

Usulan tentang perlunya pembangunan karakter memang bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan, menurut Azyumardi Azra, sebelum pelajaran agama menjadi mata pelajaran wajib, dalam rencana pelajaran pada tahun 1947, yang ada hanyalah mata pelajaran “didikan budi pekerti yang bersumber dari nilai-nilai tradisional, khususnya yang terdapat dalam cerita pewayangan<sup>5</sup>. Hal ini membuktikan bahwa, sesungguhnya pendidikan karakter ini telah lama dicanangkan. Namun, pendidikan karakter yang selama ini sering dibicarakan, umumnya hanya selalu pendidikan karakter berbasis kelas saja. Karena itu, debat yang selalu muncul biasanya adalah hanya berpaku pada tataran perlu tidakkah membuat mata pelajaran baru untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam Kurikulum. Debat seperti ini sebenarnya hanya memotret salah satu basis bagi pengembangan pendidikan karakter, yaitu pendidikan karakter berbasis kelas saja<sup>6</sup>.

Jika ingin efektif dan utuh, pendidikan karakter mestinya menyertakan tiga basis desain dalam pemrogramannya. Tanpa tiga basis itu, program pendidikan karakter, sepertinya hanya menjadi wacana semata. Tiga basis yang dimaksud adalah<sup>7</sup>:

1. Berbasis Kelas Desain pendidikan karakter berbasis kelas. Desain ini berbasis pada relasi guru sebagai pendidik dan siswa sebagai pembelajar di dalam kelas. Konteks pendidikan karakter adalah proses relasional komunitas kelas dalam konteks pembelajaran. Relasi guru-pembelajar bukan monolog, melainkan dialog dengan banyak arah sebab komunitas kelas terdiri dari guru dan siswa yang sama-sama berinteraksi dengan materi. Memberikan pemahaman dan pengertian akan keutamaan yang benar terjadi dalam konteks pengajaran ini, termasuk di dalamnya pula adalah ranah noninstruksional, seperti manajemen kelas, konsensus kelas, dan lain-lain, yang membantu terciptanya suasana belajar yang nyaman.
2. Berbasis Kultur Sekolah Desain pendidikan karakter berbasis kultur sekolah. Desain ini mencoba membangun kultur sekolah yang mampu membentuk karakter anak didik dengan bantuan pranata sosial sekolah agar nilai tertentu terbentuk dan terbatinkan dalam diri siswa

---

<sup>5</sup>Zuriah, Nurul. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, (Bumi Aksara: Jakarta. 2007), hal. 117

<sup>6</sup> Albertus, Doni Koesoema. *Mengembangkan Kultur Akademik Bagi Pembentukan Karakter Bangsa*. Makalah Konferensi Asosiasi Psikologi Pendidikan. Malang: Program Studi Psikologi Universitas Malang, 2010.

<sup>7</sup> Albertus, Doni Koesoema. *Pendidikan Karakter Integral*. Dalam <http://www.pendidikankarakter.org> di akses pada 05 Juni 2016 pukul 21.02 wib.

(*Sekolah Wiyata Mandala*). Untuk menanamkan nilai kejujuran tidak cukup hanya dengan memberikan pesan-pesan moral kepada anak didik. Pesan moral ini mesti diperkuat dengan penciptaan kultur kejujuran melalui pembuatan tata peraturan sekolah yang tegas dan konsisten terhadap setiap perilaku ketidakjujuran.

3. Berbasis Komunitas Desain pendidikan karakter berbasis komunitas. Dalam mendidik, komunitas sekolah tidak berjuang sendirian. Masyarakat di luar lembaga pendidikan, seperti keluarga, masyarakat umum, dan negara, juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan pembentukan karakter dalam konteks kehidupan mereka. Ketika lembaga negara lemah dalam penegakan hukum, ketika mereka yang bersalah tidak pernah mendapatkan sanksi yang setimpal, negara telah mendidik masyarakatnya untuk menjadi manusia yang tidak menghargai makna tatanan sosial bersama. Pendidikan karakter hanya akan bisa efektif jika tiga desain pendidikan karakter di atas dilaksanakan secara simultan dan sinergis. Tanpanya, pendidikan di Indonesia hanya akan bersifat parsial, inkonsisten, dan tidak efektif.<sup>8</sup>

Sehingga, yang muncul pun adalah tokoh-tokoh “ternama” seperti Gayus Tambunan, Miranda Gultom, Ariel-luna, Cut Nyak Dien digeser oleh Cut Tari, atau kasus kekerasan jemaah Ahmadiyah dan yang sejenisnya.

Apapun program, desain dan metodologi yang dipilih, setiap pendekatan pengembangan pendidikan karakter akan memiliki konsekuensi yang berkaitan dengan kesiapan tenaga guru, prioritas nilai, kesamaan visi misi antara anggota komunitas sekolah dan kebijakan sekolah itu sendiri. Selain di sekolahpun, pemberian pendidikan karakter juga harus tetap perlu diberikan di lingkungan keluarga.

Mengembangkan basis psikologis-akademis, dimana integasi akademis merupakan jiwa (*Soul*) bagi setiap kinerja lembaga pendidikan, tetap menjadi tantangan besar bagi pembentukan karakter bangsa. Dan satu lagi yang tidak kalah penting selain tiga basis di atas, maka persoalan evaluasi pun harus tetap dilakukan. Evaluasi bisa dilakukan secara integral antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Semakin sering evaluasi dilakukan, maka semakin sedikit kesalahan yang dilakukan. Pepatah lama mengatakan “*the experience is the best teacher in life,*” pengalaman adalah guru terbaik dalam kehidupan<sup>9</sup>.

---

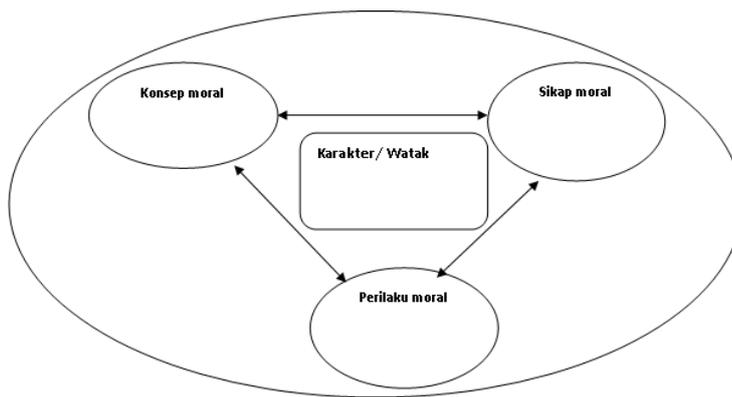
<sup>8</sup> Neil Postman, *The End of education; Redefining the value of School; Matinya Pendidikan; Redefinisi Nilai-nilai Sekolah terj. Siti Farida*, (Yogyakarta: Jendela, 2002) Hal. 32

<sup>9</sup> Zaenal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Hal. Hal. 293

## B. PENGERTIAN PENDIDIKAN KARAKTER

Penguatan pendidikan moral (*Moral Education*) atau pendidikan karakter (*Character Education*) dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di Negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, oleh karena itu betapa pentingnya pendidikan karakter.

Menurut Lickona, karakter berkaitan dengan konsep moral (*Moral Knowing*), sikap moral (*Moral Feeling*), dan perilaku moral (*Moral Behavior*). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Bagan dibawah ini merupakan bagan keterkaitan ketiga kerangka pikir ini.



Gambar: Keterkaitan antara komponen moral dalam rangka pembentukan Karakter yang baik menurut Lickona

### Pengertian Pendidikan Karakter Menurut Ahli

#### 1. Pendidikan Karakter Menurut Lickona

Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Lickona. Lickona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti.

#### 2. Pendidikan Karakter Menurut Suyanto

Suyanto (2009) mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara.

### 3. Pendidikan Karakter Menurut Kertajaya

Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan “mesin” yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu (Kertajaya, 2010).

### 4. Pendidikan Karakter Menurut Kamus Psikologi

Menurut kamus psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap (Dali Gulo, 1982: p.29).

## C. NILAI-NILAI DALAM PENDIDIKAN KARAKTER

Ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter yaitu , Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta tanah air, Menghargai prestasi, Bersahabat/komunikatif, Cinta Damai, Gemar membaca, Peduli lingkungan, Peduli social, Tanggung jawab.

Lebih jelas tentang nilai-nilai pendidikan karakter dapat di lihat pada bagan dibawah ini :



Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga

untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai the deliberate us of all dimensions of school life to foster optimal character development (usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah/madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal).

Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian dan hukuman.<sup>10</sup>

## D. PENDIDIKAN DI LUAR NEGERI

### 1. Pendidikan di Jepang

Sistem pendidikan di Jepang dibangun atas empat tingkat, yaitu: pusat, perfektual (antara Provinsi dan Kabupaten), municipal (antara Kabupaten dan Kecamatan), dan sekolah. Sistem administrasi tersebut menerapkan kombinasi antara sentralisasi, desentralisasi, Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*), dan partisipasi masyarakat. Di samping itu, terdapat asosiasi-asosiasi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua yang mendukung pengembangan sekolah. Dalam sistem tersebut terdapat peran dan hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, asosiasi-asosiasi tersebut, dan masyarakat yang saling mengisi sehingga tercipta sinergi yang memungkinkan sistem tersebut menjadi relatif efisien dan efektif. Hal ini merupakan faktor utama pencapaian mutu pendidikan di Jepang yang relatif tinggi<sup>11</sup>

Sistem pendidikan Jepang pada dasarnya adalah Sekolah Dasar (SD) 6 (enam) tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 (tiga) tahun, Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 (tiga) tahun, Universitas 4 (empat) tahun, dan Lembaga Pendidikan Tinggi 2 (dua) tahun. Wajib belajar adalah dari SD sampai SMP. Untuk masuk SMA dan Universitas pada dasarnya harus mengikuti ujian masuk. Selain sekolah tersebut, ada sekolah kejuruan atau sekolah khusus yang menampung lulusan SD atau SMP. Sekolah ini mengajarkan keterampilan khusus<sup>12</sup>. Di samping beberapa jenjang pendidikan tersebut, di Jepang juga terdapat program pendidikan prasekolah, baik dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK) maupun Play Group (PG).

Jika dilihat dari pengelola sekolah, dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu Sekolah Negeri adalah sekolah yang dikelola pemerintah, Sekolah provinsi adalah sekolah yang dikelola pemerintah daerah, Sekolah Swasta adalah sekolah yang dikelola badan hukum. Sedangkan

<sup>10</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 1999). hal 37

<sup>11</sup> Abd. Rachman Assegaf, *Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*, (Yogyakarta: Gama Media. 2003) h. 175

<sup>12</sup> <http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id09-01.html>

apabila dilihat dari tahun ajarannya, sekolah dimulai bulan April dan berakhir pada bulan Maret tahun berikutnya<sup>13</sup>.

Wajib sekolah berlaku bagi anak usia 6 sampai 15 tahun, tetapi kebanyakan anak bersekolah lebih lama dari yang diwajibkan. Tiap anak bersekolah di SD pada usia 6 tahun hingga 12 tahun, lalu SMP hingga usia 15 tahun. Pendidikan wajib ini bersifat **cuma-cuma bagi semua anak**, khususnya biaya sekolah dan buku.<sup>14</sup>

Ada tiga jenis SMA, yaitu: full time, part time (terutama malam hari), dan tertulis. Sekolah menengah yang full time berlangsung selama 3 tahun, sedangkan kedua jenis sekolah lainnya menghasilkan diploma yang setara. Bagian terbesar siswa mendapat pendidikan menengah atas di SMA full time. Jurusan di SMA dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pola kurikulum, yaitu jurusan umum (akademis), pertanian, teknik, perdagangan, perikanan, home economic, dan perawatan.

Hampir semua SMP dan SMA serta Universitas swasta menentukan penerimaan siswa melalui ujian masuk, dan setiap sekolah menyelenggarakan ujian masuk sendiri. Siswa yang ingin masuk sekolah yang bersangkutan harus mengikuti ujian. Karena ujian masuk sangat sulit, siswa kerap mengikuti les tambahan (bimbingan belajar) di juku atau yobiko pada akhir pekan atau pada sore/malam hari biasa, selain pelajaran sekolahnya<sup>15</sup>

Ada tiga jenis lembaga pendidikan tinggi, yaitu: universitas, junior college (akademi), dan technical college (akademi teknik). Pendidikan tinggi di Jepang berada di bawah pengelolaan tiga lembaga, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta.

## 2. Pendidikan di Malaysia

Setelah mengalami kemerdekaan, Malaysia mulai membangun negara di bidang pendidikan. Kaitannya dengan pembangunan pendidikan, Malaysia menggunakan sistem pendidikan sama seperti sistem pendidikan yang diterapkan di Inggris, yaitu pendidikan dasar selama enam tahun, disusul pendidikan menengah selama lima tahun (tiga tahun menengah rendah atau pertama, dan dua tahun menengah atas). Semua itu dapat diakses anak-anak Malaysia dengan gratis. Para siswa wajib mengikuti ujian Negara di setiap akhir jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah awal dan tinggi. Pada tahun 2006, jumlah siswa yang bersekolah di pendidikan dasar ada 3.111.948 anak, sedangkan jumlah siswa yang bersekolah di pendidikan menengah ada 2.304.976 anak.

---

<sup>13</sup>*ibid*

<sup>14</sup> <http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id09-02.html>

<sup>15</sup> Abd Rachman Assegaf, *Ibid.* hal. 178-179.

Pendidikan rendah atau dasar (Primary Education) di Malaysia berlangsung 6 tahun yang wajib diikuti oleh anak-anak usia 7-12 tahun. Wajib belajar di Malaysia dicanangkan dan dilaksanakan mulai tahun persekolahan 2003. Pendidikan wajib adalah satu peraturan yang mewajibkan setiap orang tua Keteledoran orang tua memasukan anaknya untuk mengikuti wajib belajar dianggap sebagai kesalahan menurut undang-undang. Dan jika hal ini terbukti di pengadilan, maka orang tua tersebut didenda maksimal RM 5000 atau dihukum maksimal 6 bulan.

Sekolah Menengah di Malaysia merupakan sekolah lanjutan setelah anak menempuh sekolah dasar selama 6 tahun. Sekolah menengah ini berlangsung selama 5 tahun. Pada akhir kelas 3, para siswa harus mengikuti ujian untuk menentukan kelulusan di sekolah menengah rendah, yang disebut penilaian menengah rendah, (PMR) atau dahulu dikenal dengan istilah Sijil Penjajahan Rendah (SPR), dalam bahasa Inggris disebut Lower Certificate Education (LCE) Setelah itu, siswa akan diarahkan untuk masuk kelas berikutnya dengan pilihan jurusan IPA (Science) atau seni (Arts). Siswa dapat memilih sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Umumnya jurusan IPA lebih dipilih oleh siswa. Meskipun dalam perjalanannya, siswa masih diberikan kesempatan untuk beralih dari jurusan IPA ke jurusan seni.<sup>16</sup>

Pendidikan di Malaysia bertujuan mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tujuan ini dimaksudkan agar dapat melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara.<sup>17</sup>

Mengenai kurikulum pendidikan, ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kurikulum di Malaysia relatif stabil. Kurikulum yang digunakan di sekolah Rendah Malaysia disebut dengan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Dari data Kementerian Pelajaran Malaysia, KBSR mulai diujicobakan tahun 1982 di 302 buah sekolah rendah. Sejak tahun 1988, pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai dan hingga tahun 2007 masih dipergunakan.

Sedangkan untuk pendidikan tinggi, umumnya dikelola oleh pemerintah dan swasta. Pendidikan tinggi menawarkan berbagai macam program sertifikat, diploma, sarjana, pascasarjana. Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri diselenggarakan oleh pemerintah, seperti universitas negeri, perguruan tinggi negeri, sekolah tinggi negeri, politeknik, dan lembaga pelatihan guru. Sedangkan Lembaga Pendidikan tinggi swasta diselenggarakan oleh swasta

---

<sup>16</sup>Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia.*, hlm. 185- 187.

<sup>17</sup>Abd.Rahman Assegaf, *Ibid.*, hlm. 115- 117.

seperti universitas swasta, perguruan tinggi swasta, sekolah tinggi swasta dan cabang universitas luar negeri. Kini jumlah perguruan tinggi swasta di Malaysia lebih dari 400 buah.<sup>18</sup>

Mengenai biaya pendidikan dasar orang tua siswa hanya diminta membayar iuran sekolah pada awal tahun ajaran baru. Besarnya iuran yang dipungut oleh pihak sekolah berkisar antara RM 50 sampai RM 70 ( Rp. 125.000-187.500 ) per tahun siswa. Iuran tersebut dirinci untuk pembayaran asuransi, biaya ujian tengah semester dan ujian semesteran, iuran khusus, biaya LKS, praktek computer, kartu ujian, file data siswa dan rapor.<sup>19</sup>

Pendidikan agama Islam selain sebagai pelajaran juga dimasukkan kesekolah mulai dari tingkat dasar sampai menengah yang diajarkan dengan pelajaran lain. Ada juga lembaga pendidikan yang mengkhususkan dirinya untuk memberi pelajaran agama dengan porsi lebih dari sekolah-sekolah kerajaan. Lembaga ini disebut dengan Sekolah Menengah Agama yang dibagi tiga jenis:

- a. Sekolah Menengah Agama Kerajaan.
- b. Sekolah Menengah Agama Negeri.
- c. Sekolah Menengah Agama Rakyat.<sup>20</sup>

Sejak merdeka pada tahun 1957, ilmu pengetahuan agama Islam telah dijadikan sebagai kurikulum pendidikan nasional di Malaysia; diberikan selama 120 menit per minggunya. Akan tetapi, karena pemerintah tidak melakukan penekanan atau kewajiban lulus ujian ilmu pengetahuan agama Islam, pelajaran ini tidak mendapat perhatian serius dari siswa. Lalu pada tahun 1975, berbagai langkah penting untuk memperkuat pendidikan Islam di negara ini telah ditempuh oleh Departemen Pendidikan. Pada tahun 1982, Perdana Menteri Mahathir Muhammad mengambil keputusan untuk menjalankan kebijakan penanaman nilai-nilai Islam di pemerintahan. Dengan demikian, peran Islam kian penting dalam negara.

### 3. Pendidikan di Inggris.

Menurut William, bahwa nalar pendidikan di Inggris didasari yang bernama sistem pengetahuan rasional, empirisme dan positivisme. William melanjutkan dan menguraikan dari dasar filosofis epistemologis pendidikan di Inggris (Eropa), yaitu Empirisme, Bahafiorisme (filosofis), Empirisme (filosofis), Empirisme biologis, Pragmatisme,

---

<sup>18</sup>Arif Rohman, *Ibid*, hlm. 189-190.

<sup>19</sup>Binti Maunah, *Perbandingan Pendidikan Islam*, cet.1 ( Yogyakarta : Teras, 2011) hal 144

<sup>20</sup>Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan di Asia Tenggara*, cet. 1 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 53-60.

Instrumentalisme, Eksperimentalisme, Hidonisme psikologis, *Reinforcement*, Relativisme Budaya, Demokrasi sosial, Subjektivisme Substansial, liberasionisme, liberalisme pendidikan.

Kemudian Wiliam mengungkapkan juga pokok liberelisme pendidikan yang terjadi di Inggris :

- a. Seluruh hasil kegiatan belajar adalah pengetahuan melalui pengamalan personal
- b. Seluruh hasil kegiatan belajar bersifat subjektif dan selektif. Seluruh hasil kegiatan belajar berakar pada keterlibatan pengertian indrawi.
- c. Seluruh hasil –hasil belajar didaari oleh proses pemecahan masalah secara aktif dalam pola “ coba benar-salah” atau (*trial and eror*)
- d. Cara belajar yang baik diatur oleh perintah-perintah eksperimentanal yang bercirikan metode ilmiah
- e. Pengetahuan yang terbaik adalah yang paling selaras dengan (atau mungkin derdasarkan) pembuktian ilmiah yang dianggap benar sebelumnya
- f. Kegiatan belajar diarahkan dan dikendalikan oleh konsekuensi –konsekuensi emosional dari perilaku
- g. Sifat-sifat hakiki dan isi pengetahuan social mengarahkan dan mengendalikan sifat-sifat haiki dan isi pengalaman personal
- h. Penyelidikan kritis yang mempunyai arti penting hanya bisa berlangsung dalam masyarakat yang demoratis dan memiliki komitmen terhadap ungkapan umum pemikiran dan perasaan individual.<sup>21</sup>

### 1) Kebijakan di Bidang Pendidikan Agama di Inggris.<sup>22</sup>

Pendidikan Agama (*Religious Education*) adalah mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan negara di Inggris. Sekolah diminta untuk mengajarkan program studi agama sesuai dengan pedoman lokal dan nasional. Pendidikan agama di Inggris diamanatkan oleh Undang-Undang Pendidikan 1944 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Reformasi Pendidikan 1988 dan Standar Sekolah dan Kerangka Undang-Undang 1998. Pemberian Pendidikan Agama adalah wajib di semua sekolah yang didanai negara, akan tetapi tidak wajib bagi setiap

<sup>21</sup><http://ariefsugianto503.blogspot.com/2014/12/nalar-filsafat-pendidikan-inggris-dan.html> diakses pada tanggal 13 juni 2016.

<sup>22</sup> Joseph S. Szyliowics, *Education and Moderniation in midle east; Pendidikan dan Modernisasi Dalam Islam terj. Ah. Jaenuri* (Surabaya : Al Ihlas, 2001) hal 86

anak-anak untuk mengambil subjek (mata pelajaran). Subjek terdiri dari studi agama-agama, pemimpin agama, dan tema agama dan moral yang berbeda. Namun, kurikulum yang dipakai didominasi dari agama Kristen dalam kehidupan beragama dan karenanya agama Kristen merupakan mayoritas isi subjek. Semua orang tua memiliki hak untuk menarik anak dari pendidikan agama, yang sekolah harus menyetujui.<sup>23</sup>

## 2) Pengembangan Kurikulum dan pengembangan Guru di Inggris.

Dari segi kurikulum, sekolah-sekolah di Inggris menggunakan kurikulum nasional (*National Curriculum*). Kurikulum nasional ditentukan oleh Dewan Pengembangan Kurikulum Sekolah (*School Curriculum Development Council – SCDC*) khususnya untuk sekolah pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Semula dewan pengembang kurikulum masih menjadi satu dengan dewan ujian nasional, yakni dalam satu wadah yang bernama *The School Council for Curriculum and Examinations*, namun sejak tahun 1982 lembaga tersebut dipecah menjadi dua.

Dewan Pengembang Kurikulum Sekolah tidak mudah dan seenaknya saja mengganti kurikulum pendidikan. Perubahan kurikulum akan selalu melibatkan banyak pakar yang sungguh berkompeten dibidangnya. Mereka menjunjung tinggi warisan tradisi keilmuan mereka yang sangat kuat berakar. Materi pelajaran pokok yang mereka anggap bagus sejak 100 tahun lalu, akan dipertahankan sampai kapanpun. Sementara bidang-bidang baru yang ingin diajukan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum nasional, harus melewati prosedur yang panjang.

Ada tiga cara untuk memperoleh kualifikasi menjadi guru di UK:

**A.** Mengikuti kuliah selama tiga tahun untuk Sertifikat Pendidikan (*nongraduate Certificate of Education*); system ini dalam program penghapusan.

---

<sup>23</sup> Agustiar Syah Nur, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, (Bandung: Lubuk Agung. 2001), hlm. 110

- B. Tiga dan empat tahun kuliah untuk mendapatkan gelar Sarjana Muda Pendidikan (*Bachelor of Education*); dan
- C. Satu tahun di tingkat pasca sarjana bagi mereka yang memiliki gelar pertama non kependidikan. Mulai tahun 1984, untuk memasuki lapangan kerja guru hanya melalui jalur pasca sarjana. Disamping itu, kompetensi matematika dan bahasa Inggris dalam standar GCE- 'O' sangat diharapkan.

Selama dalam pendidikan guru-guru dapat mengambil spesialisasi dalam bidang-bidang tertentu atau dalam tingkat, misalnya sekolah dasar atau sekolah menengah. Di Scotland, guru-guru boleh mengajar pada level yang sesuai dengan kualifikasinya. Tidak ada kualifikasi mengajar yang dituntut bagi guru-guru yang mengajar di pendidikan lanjutan (*furthet education*) dan pendidikan tinggi.

### 3) Pembiayaan Pendidikan di Inggris.

Belanja pendidikan dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan seluruh anggaran pemerintah Inggris pada tahun 1990 kurang lebih 14.1 % sama dengan presentase 10 tahun sebelumnya. Jumlah ini kira-kira 4,5% dari *Gross Domestic Product* (GDP). Sungguhpun pemerintah menganggarkan sebagian besar sumber pembiayaan pendidikan, dana ini pada dasarnya dibelanjakan oleh LEAS. Pengeluaran oleh LEAS diperkirakan sebesar 17,272 juta Pounds Sterling dibandingkan dengan pengeluaran di pusat sebesar 3,647 juta Pounds Sterling yaitu 83 % : 17 %.

Bagian terbesar pengeluaran sekolah adalah untuk gaji guru-guru dengan proporsi kurang lebih 70 % dari belanja keseluruhan. Politeknik yang sekarang menjadi universitas serta sekolah tinggi lainnya menerima anggaran belanjanya melalui *Polytechnics and College Funding Council* (PCFC). Dana untuk universitas dan badan-badan penelitian disalurkan melalui *University Funding Council* (UFC). Dana untuk biaya pendidikan guru-guru disalurkan melalui program LEA

dan digunakan menurut prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Juga tersedia dana untuk pendidikan guru-guru yang bertugas mengajar para imigran. Seluruh biaya Departemen Pendidikan dan LEA dibagi sebagai berikut: untuk sekolah – 61 % untuk pendidikan tinggi termasuk akademi -29%; pusat-pusat penelitian 4%; dan untuk biaya administrasi -5,7%. Pada tahun 1991, sebuah proposal diajukan untuk memberikan status lembaga social kepada seluruh sekolah. Ini memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mendapatkan pembebasan pajak atas asset-aset pendidikan. LEA juga menerima dana dari sumber-sumber lain, dan kira-kira 50% dari dana itu digunakan sendiri oleh LEAS untuk keperluan pendidikan dalam wilayahnya.<sup>24</sup>

#### **D. Pendidikan di Amerika Serikat<sup>25</sup>**

Sistem pemerintahan di AS hampir mirip dengan di Indonesia. Terdiri dari 3 lapis pemerintahan yaitu pusat disebut Federal atau *Central Government*, pemerintah provinsi atau negara bagian yang disebut *State government* dan yang ketiga pemerintah kota atau kabupaten yang disebut *Local Government*. Ada 51 negara bagian atau state di AS, dan ada sekitar 10 sampe 30 kota/kabupaten atau disini disebut *Town / City* disetiap negara bagian.

Ternyata sudah menjadi kultur budaya yang sangat mengakar dalam sejarah AS bahwa pendidikan menjadi tugas bagi keluarga dan masyarakat. oleh karena itu masyarakat tidak mau kalau pendidikan diatur oleh pemerintah pusat, bahkan oleh pemerintah negara bagian, bahkan oleh pemerintah lokal sekalipun. Masyarakat merasa memiliki hak yang sangat kuat untuk menentukan sistem pendidikan seperti apa yang paling tepat untuk masyarakat mereka. Mereka menganggap tantangan yang dihadapi oleh setiap komunitas tidaklah sama, jadi sistem pendidikan juga tidak boleh atau tidak perlu disamakan antara satu kota dengan kota lain, antara satu state dengan state lain.

Terdapat pemilihan umum melalui pemilu lokal yang disebut wakil-wakil mereka yang akan mengurus urusan pendidikan, yaitu yang disebut *school commitee* atau komite sekolah. Bedanya dengan di Indonesia komite sekolah adanya ditiap sekolah, tapi di AS komite sekolah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 118

<sup>25</sup> <http://hendronurprasetyo.blogspot.com>

adanya ditingkat kota/kab. Jadi mungkin mirip dengan Dewan Pendidikan di Indonesia, hanya bedanya komite sekolah di AS dipilih langsung oleh rakyat.<sup>26</sup>

Komite sekolah ini berjumlah berkisar 5-7 orang tergantung jumlah penduduk, dan mereka akan memilih yang disebut *Super Intendants* sebanyak 1 orang. Maka untuk urusan pendidikan komite sekolah berfungsi sebagai legislatifnya dan *super intendant* sebagai eksekutifnya atau kepala dinasny. Jadi semacam ada 2 pemerintahan ditingkat lokal, yaitu pemerintahan yang mengurus pendidikan, dan pemerintahan yang mengurus selain pendidikan. Eksekutif yang mengurus pendidikan disebut *super intendant* dan eksekutif yang mengurus selain pendidikan disebut *mayor* atau *town manager*. Pendapatan pemerintah lokal berasal dari pajak *property* yang dipungut dari masyarakat, uang ini dipegang oleh *mayor/town manager* dan 60% dari uang ini diserahkan kepada *Super Intendant*.

Tugas dari Komite Sekolah adalah : mengurus anggaran pendidikan, mengangkat *Super Intendant* (SI), membuat kebijakan pendidikan termasuk kurikulum, dan melaporkan ke publik (masyarakat). Tugas SI adalah : Mengangkat *Principals* atau Kepala Sekolah, mengangkat staf dan direktur-direktur pendidikan (subdin-subdin), melaksanakan pengelolaan pendidikan, dan melaporkan ke komite sekolah. Tugas dari *Principals* adalah : Sebagai *manager* di sekolah, mengangkat guru-guru, melaksanakan kurikulum dan melaporkan ke SI. Tugas guru adalah membuat draft kurikulum, menentukan buku (tapi tidak boleh menjual), mengajar, melaporkan ke *principals*.

Keuangan untuk pendidikan yang diberikan ke SI melalui komite sekolah berasal dari 60% kekayaan pemerintah lokal, 40% kekayaan pemerintah state dan 10% kekayaan pemerintah pusat. Tetapi ketika pemerintah state dan pusat memberikan kekayaannya ke komite sekolah, maka komite sekolah wajib menerima kebijakan-kebijakan pendidikan pemerintah pusat dan state yang terkait dengan jumlah uang yang diberikannya itu.

Di Indonesia kita mengenal wajib belajar SD dan SMP. Di Amerika kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga sudah lama diberlakukan. wajib belajar di AS mulai dari SD sampai SMA. Tapi pemerintah menggratiskan biaya sekolah sejak TK sampai SMA untuk sekolah-sekolah negeri. Untuk sekolah swasta, pemerintahan dipusat sampai lokal tidak memberikan anggaran apapun, dan sebaliknya sekolah itupun tidak diwajibkan mengikuti seluruh kebijakan pemerintah dibidang pendidikan.

---

<sup>26</sup> Myron Lieberman, Charlene K. Haar, *Public education as a business : real costs and accountability*, United State of America : The Scarecrow Press, 2003

Pada tahun 2001 pemerintah pusat melakukan Reformasi di bidang pendidikan dengan meluncurkan kebijakan NCLB atau *No Child Left Behind* atau Tak ada satupun anak yang tertinggal dibelakang. Kebijakan ini terkait dengan mutu atau kualitas anak didik. Negara bagian Massachusetts yang selalu terbaik dalam pendidikan telah lebih dulu mengawali kebijakan ini pada tahun 1993. Kebijakan NCLB ini antara lain dilakukan dalam bentuk penciptaan standar-standar mutu hasil didik dan pelaksanaan Ujian Nasional.

#### **E. KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Kurikulum pendidikan nasional berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 36 yaitu:

1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
3. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 46

1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Adapun sumber pendanaan pendidikan sesuai dengan UUSPN di jelaskan bahwa :

1. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### Pengelolaan Dana Pendidikan

1. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
2. Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah.<sup>27</sup>

#### F. ANALISIS PERBANDINGAN

Pengelolaan pendidikan Negara-negara tidak terlalu jauh berbeda. Tujuan pendidikan Amerika Mengembangkan individualitas dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, menyiapkan lulusan yang berkualitas. Pendanaannya ialah Seluruh biaya personil ditanggung oleh pemerintah negara bagian, dan infrastruktur oleh masyarakat.

Pendidikan di Kanada di kelola oleh masing-masing provinsi. Pendanaan dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah Inggris memberikan perhatian yang sangat besar pada bidang pendidikan. Dengan biaya pendidikan yang terjangkau untuk seluruh penduduk memungkinkan anak-anak Kanada mengakses pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Amerika Serikat mengembangkan visi dan misi pendidikan gratis bagi anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan awal, dan biaya pendidikan relative murah untuk tingkat pendidikan tinggi.

Orang Amerika menempuh 12 tahun pendidikan di primary dan secondary school. Dengan ijazah dari secondary school (high school), mereka dapat melanjutkan studinya ke college, university, vocational (job training) school, secretarial school, dan professional school lainnya. Jika dibandingkan dengan di AS, sumber pendanaan pendidikan di Indonesia berasal dari beberapa sumber anggaran. Yaitu berasal dari APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten/Kota.

---

<sup>27</sup> Muhammad Sairozi, Muhammad Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).hal 45-48

Indonesia dan Amerika, Anggaran pemerintah pusat lebih banyak diberikan ke sekolah-sekolah negeri.

Salah satu upaya yang bisa dijadikan starting point bagi upaya perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan Indonesia adalah dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan KAJI banding dengan sistem negara Jepang, Malaysia, Inggris, dan Amerika sehingga bisa menjadi gambaran bagi kita, bagaimana kita bisa memperkuat sistem pendidikan Indonesia dan memperbaiki kekurangan yang ada. Melalui peningkatan kualitas sistem pendidikan Indonesia, kelak Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan berada di barisan terdepan dalam usaha mewujudkan dunia yang lebih baik lagi.

Lahirnya UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 tentang sisdiknas tak jauh berbeda dengan UU sebelumnya ( UU No. 2 tahun 1989 ). Pendidikan swasta secara eksplisit tidak tercantum dalam UU baru ini, sehingga keberadaan pendidikan swasta dianggap oleh sebagian orang misterius atau tidak jelas. Memang UU ini memberi peluang yang sejajar (sama) kepada setiap warga Negara Indonesia untuk belajar dan menyelenggarakan usaha pendidikan. Seperti tercantum dalam bab 1 pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa “ Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional” Namun pada kenyataannya banyak komponen yang terabaikan, hal tersebut hanya bersifat teoritis belaka. Banyak sekali diskriminasi yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan (diknas) terhadap pendidikan swasta. Yang pada akhirnya muncullah hubungan yang tidak harmonis (tidak sehat) antara pendidikan negeri yang dikelola oleh pemerintah dengan lembaga pendidikan swasta yang dikelola yayasan atau masyarakat. sehingga dikotomi diantara dua lembaga pendidikan tersebut.

Hasil penelitian ADB (Asian Development Bank) dan UHK (The University of Hongkong) tentang system pendidikan Nasional kita, memperparah kondisi dan posisi riil pendidikan swasta. Penelitian ini membuktikan adanya diskriminasi terhadap lembaga pendidikan swasta, terutama dalam hal tenaga kependidikan dan anggaran, yaitu dana penyelenggaraan (recurrent budgets) dan dana pengembangan (development budgets). Untuk SLTP misalnya, siswa sekolah negeri yang siswanya mencapai 4.684.000 mendapat bantuan penyelenggaraan sebesar 1,760 milyar, sedang pada siswa sekolah swasta yang mencapai 2.262.000 mendapat bantuan dana penyelenggara 29 milyar. Sehingga nominal yang didapat siswa sekolah negeri adalah 376 ribu rupiah, sedang siswa sekolah swasta nominalnya hanya 21 ribu rupiah. Contoh ini jelas-jelas membuktikan terjadinya diskriminasi, sehingga tidak salah ketika sarpras dan kualitas sekolah

swasta pada umumnya dibawah sekolah negeri<sup>28</sup>. Contoh lain ketidakadilan pemerintah yaitu tentang :

1. Legitimasi Sekolah. Pendidikan swasta yang dikelola masyarakat harus mengalami beberapa tahapan agar sejajar dengan pendidikan negeri yaitu : terdaftar, diakui, disamakan, terakreditasi.
2. Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan
  - a. Peserta Didik
    - 1) UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 bab 4 pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa “ setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” Akan tetapi pada kenyataannya anak-anak yang inputnya kurang mampu tidak bisa melanjutkan pendidikan pada sekolah yang berkualitas. Yang akhirnya kualitas pendidikan swasta dari tahun ke tahun tidak meningkat.
    - 2) Bab 5 pasal 12 ayat 1 bagian c, yang menjelaskan bahwa “ Setiap peserta didik berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”. Bagaimana mungkin anak-anak disekolah swasta dapat merasakan beasiswa ?, dari inputnya saja mayoritas sudah buangan dari sekolah – sekolah yang bermutu, sedangkan ekonomi mereka mayoritas dari keluarga kurang mampu. Nah, inilah yang menimbulkan ketidakadilan bagi anak.
  - b. Tenaga Pendidik dan Kependidikan
    - 1) Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga kependidikan antara pendidikan negeri dengan pendidikan swasta mempunyai kewajiban yang sama yaitu tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia 4.( mencerdaskan kehidupan bangsa ). Akan tetapi hak mereka untuk mendapatkan kesejahteraan sama sekali belum memadai dengan kewajiban yang dilakukan. Terkadang upahnya dibawah UMR daerah setempat.
    - 2) Kualitas pendidik
 

Kualitas guru yang ada pada sekolah negeri dan swasta jauh berbeda. Banyak kita jumpai pada sekolah swasta masih ada guru yang belum mempunyai ijazah atau sertifikat guru. Pemerataan guru negeri pada sekolah swasta belum memadai.

### 3. Sarana dan Prasarana

---

<sup>28</sup> Markus Bsuki, Pembinaan pendidikan sekolah swasta, <http://coramorm.blogspot.com/2010/11/pembinaan-pendidikan-sekolah-swasta.html>.

Didalam bab XII pasal 45 ayat 1,2, dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal atau nonformal harus menyediakan sarpras untuk memenuhi keperluan pendidikan. Akan tetapi jika kita lihat apa yang terjadi pada sekolah swasta yang semuanya serba kekurangan. Nah, disini pemerintah hanya melihat sebelah mata tanpa berpikir jauh tentang keadaan sebenarnya. Sarana yang dimiliki pendidikan negeri lebih komplit: gedung, fasilitas sekolah, ATK dan lain-lain ketimbang pendidikan swasta.

#### 4. Anggaran

Berdasarkan bab XIII bagian I pasal 1,2,3 dan bagian 2 pasal 1,2,3, menjelaskan bahwa anggaran pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, namun kenyataannya sekolah-sekolah swasta anggaran yang digulirkan tidak seimbang dengan sekolah-sekolah negeri. Bahkan ada yang sama sekali tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Bagaimana keberadaan pasal tersebut, masih layakkah dipertahankan ?

#### G. Kedudukan Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional (UUSPN), madrasah memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya (persekolahan). Namun demikian perhatian pemerintah terhadap keberadaan madrasah masih sangat kurang, bahkan menurut Yahya Umar menyebutnya sebagai "forgotten community". Pernyataan Yahya Umar tersebut bagi banyak orang mungkin mengejutkan, namun realitas membenarkannya. Berdasarkan data yang dikeluarkan Center for Informatics Data and Islamic Studies (CIDIES) Departemen Agama dan data base EMIS (Education Management Syatem) Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama, jumlah madrasah (Madrasah Ibtidaiyah/MI (SD), Madrasah Tsanawiyah/MTs (SMP) dan madrasah Aliyah/MA (SMA)) sebanyak 36.105 madrasah (tidak termasuk madrasah diniyah dan pesantren). Dari jumlah itu 90,08 % berstatus swasta dan hanya 9,92 % yang berstatus negeri. Kondisi status kelembagaan madrasah ini dapat digunakan untuk membaca kualitas madrasah secara keseluruhan, seperti keadaan guru, siswa, fisik dan fasilitas, dan sarana pendukung lainnya, karena keberadaan lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah di tanah air pada umumnya sangat tergantung kepada pemerintah. Atas dasar itu, tidak terlalu salah kalau dikatakan bahwa madrasah-madrasah swasta yang berjumlah 32.523 buah mengalami masalah yang paling mendasar yaitu berjuang keras untuk mempertahankan hidup, bahkan sering disebut *lâ yamûtu walâ yahya* (tidak hidup dan perlu banyak biaya (agar tidak mati)). Namun demikian, madrasah bagi masyarakat Indonesia tetap memiliki daya tarik. Hal ini dibuktikan dari adanya peningkatan jumlah siswa madrasah dari tahun ke tahun rata-rata sebesar 4,3 %, sehingga berdasarkan data CIDIES, pada tahun 2005/2006 diperkirakan jumlah

siswanya mencapai 5, 5 juta orang dari sekitar 57 juta jumlah penduduk usia sekolah di Indonesia<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Tobroni, Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah, (Sebuah tulisan yang dibuat untuk menanggapi kebijakan yang disampaikan oleh Prof. Dr. yahya Umar, direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama), (situs: [emiardiyanti.blogspot.com](http://emiardiyanti.blogspot.com), 2009), diakses: 10 Mei, 2016

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_ Pendidikan Karakter Integral. Dalam <http://www.pendidikankarakter.org>
- Agustiar Syah Nur, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, (Bandung: Lubuk Agung. 2001
- Agustiar Syah Nur, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, Bandung: Lubuk Agung. 2001
- Albertus, Doni Koesoema. Mengembangkan Kultur Akademik Bagi Pembentukan Karakter Bangsa. Makalah Konferensi Asosiasi Psikologi Pendidikan. Malang: Program Studi Psikologi Universitas Malang, 2010.
- Angkasa, Ig Kingkin Teja. Merealisasikan Pendidikan Karakter. Artikel Opini Koran Kompas. Dalam <http://edukasi.kompas.com>,
- Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia.*, hlm. 185- 187.
- Arifin Zaenal , *Evaluasi Pembelajaran*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Assegaf, Rachman Abd, *Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*, Yogyakarta: Gama Media. 2003
- Azra Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* Jakarta: Logos, 1999
- Binti Maunah, *Perbandingan Pendidikan Islam*, cet.1 Yogyakarta : Teras, 2011
- Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan di Asia Tenggara*, cet. 1 Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009
- <http://ariefsugianto503.blogspot.com/2014/12/nalar-filsafat-pendidikan-inggris-dan.html>
- <http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id09-01.html>
- Joseph S. Szyliowics, *Education and Moderniation in midle east; Pendidikan dan Modernisasi Dalam Islam terj. Ah. Jaenuri* Surabaya : Al Ihlas, 2001
- Markus Basuki, *Pembiayaan Pendidikan Sekolah Swasta*, Dalam <http://coramorem.blogspot.com/2010/11/pembiayaan-pendidikan-sekolah-swasta.html>
- Myron Lieberman, Charlene K. Haar, *Public education as a business : real costs and accountability*, United State of America : The Scarecrow Press, 2003
- Neil Postman, *The End of education; Redefining the value of School; Matinya Pendidikan; Redefinisi Nilai-nilai Sekolah* terj. Siti Farida, Yogyakarta: Jendela, 2002
- Sirozi Muhammad, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Suyanto Urgensi Pendidikan Karakter. Artikel Opini di situs resmi Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional . 2009. Dalam <http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id>,

Tobroni, Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah, (Sebuah tulisan yang dibuat untuk menanggapi kebijakan yang disampaikan oleh Prof. Dr. yahya Umar, direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama), Dalam situs: [emiardiyanti.blogspot.com](http://emiardiyanti.blogspot.com), 2009

Ya'kub, M. Edi. 'Quo Vadis' Pendidikan Karakter. Dalam <http://edukasi.kompas.com>,

Zuriah, Nurul. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, Bumi Aksara: Jakarta. 2007